Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Available at https://journal.uii.ac.id/jkek

Analisis pengaruh PDRB sektor pariwisata dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Rifa Nabila Zulfa, Prastowo*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia *Corresponding author: prastowo@uii.ac.id

JEL Classification Code:

P46, O11, P36

Kata kunci:

Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan

Email penulis:

20313259@students.uii.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol3.iss1.art3

Abstract

Purpose – This research aims to analyze the influence of PDRB on the tourism sector and education on poverty in Bali Province 2010-2022.

Methods – The method used in this study is panel data regression using the Poverty variable as the dependent variable and the GRDP Ratio, District Minimum Wage in the Tourism Sector, Average Length of Schooling, and Life Expectancy as independent variables.

Findings – The results of the study indicate that the GRDP in the tourism and education sectors has a negative and significant effect on poverty in Bali Province.

Implication – The local government, especially in Bali Province, can consistently increase the GRDP in the tourism sector every year. The government also needs to improve educational facilities and infrastructure, as well as pay attention to the equal distribution of education quality and improve the quality of human resources.

Originality – This study contributes to the economic development policy of the tourism sector, especially in Bali Province.

Abstrak

Tujuan –. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, dan pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2022.

Metode – Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi panel data dengan menggunakan variabel Kemiskinan sebagai variabel dependen dan Rasio PDRB, Upah Minimum Kabupaten Sektor Pariwisata, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Umur Harapan Hidup sebagai variabel independent.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektor pariwisata dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Implikasi – Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Bali dapat secara konsisten menaikkan PDRB sektor pariwisata setiap tahunnya. Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan ekonomi sektor pariwisata khususnya di Provinsi Bali.

Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang hampir ada di seluruh negara. Permasalahan tersebut selalu menjadi penghambat di pertumbuhan suatu negara dan permasalahan ini justru sering terjadi di negara berkembang, contohnya di Indonesia (Wiadnyana & Hadiyati, 2023). Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mencari formula yang tepat

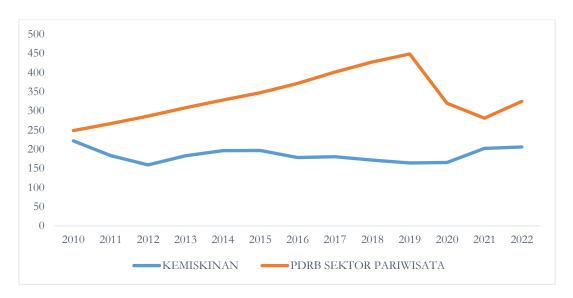
untuk menyelesaikannya. Salah satu permasalahan yang menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi di suatu daerah adalah berkurangnya pendapatan riil masyarakat (Aswin & Yasa, 2021). Seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman selalu memberikan perubahan yang signifikan, seperti halnya dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi di suatu daerah atau bahkan di suatu negara, secara umum merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mensejahterakan rakyat (Halim, 2020). Oleh karena itu, adanya pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi kunci dari keberhasilan suatu daerah, semakin tinggi ekonomi daerah tentu saja dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Pendapat tersebut sama dengan penelitian (Siadari & Damanik, 2023) dan (Susanto & Pangesti, 2020) bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya menjadi salah satu cara yang dapat menurunkan angka kemiskinan karena pembangunan ekonomi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, dan dapat memperluas tenaga kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa pembangunan nasional menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan begitu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan daerah yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah tersebut perlu diperhatikan agar sesuai sasaran mulai dari pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Berhasil tidaknya pembangunan nasional dapat dilihat dari angka kemiskinan, jika angka kemiskinan menurun maka dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi, adanya kebijakan tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena pada dasarnya menurunnya angka kemiskinan sendiri tidak hanya dilihat dari satu faktor utama saja, tetapi harus diikuti dengan berbagai indikator lain, seperti ekonomi, SDM, infrastruktur, dan masalah sosial (rumah tangga).

Provinsi Bali saat ini mempunyai 8 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Denpasar. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, terlepas dari kondisi tersebut jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan seringkali dijumpai pada daerah pedesaan (Made Ariasih & Yuliarmi, 2021a). Struktur ekonomi yang dimiliki Provinsi Bali dapat dikatakan cukup unik jika dibandingkan dengan provinsi lain karena sebagian besar daerah di Provinsi Bali mempunyai penghasilan dari sektor pariwisata (Aswin & Yasa, 2021). Kondisi dari tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti kesulitan untuk memenuhi bahan makanan. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan di Provinsi Bali juga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah setempat (Aristina dkk, 2017).

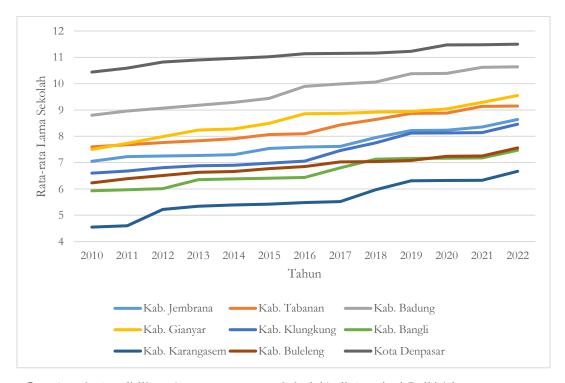
Secara umum, pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi alat keberlanjutan atas kualitas lingkungan dengan menggabungkan 3 pilar pembangunan, yaitu lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Terlebih lagi sekarang Provinsi Bali menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berkunjung atau berwisata di Bali. Dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan di Bali tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui adanya hotel, tempat makan, persewaan alat transportasi, dan tempat wisata lainnya yang dapat dikembangkan untuk wisata. Dengan begitu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menekan atau mengurangi kemiskinan di Provinsi Bali.

Selain itu, angka kemiskinan yang tinggi tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, kesehatan, PDRB, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan lain sebagainya. Secara umum, semakin tinggi angka pendidikan tentu akan mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh (Dariwardani,2014 dalam (Made Ariasih & Yuliarmi, 2021b). Selain pendidikan, PDRB juga dapat mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan, jika angka PDRB meningkat tentu saja dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kedua variabel tersebut merupakan contoh dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah.



Gambar 1. Kemiskinan di Provinsi Bali dengan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2010-2022

Pada Gambar 1. menunjukkan grafik antara kemiskinan di Provinsi Bali dengan PDRB Sektor Pariwisata di Provinsi Bali selama periode 2010-2022 yang meliputi; data PDRB Transportasi dan PDRB Akomodasi (perhotelan dan restoran). Melihat grafik tersebut, ketika PDRB sektor pariwisata tinggi justru angka kemiskinan mengalami penurunan. Oleh karena itu, adanya PDRB sektor pariwisata sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah. Terlebih Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pariwisata yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Akan tetapi, di beberapa kabupaten di Provinsi Bali masih belum sepenuhnya di dominasi oleh sektor pariwisata bahkan masih terdapat beberapa kabupaten yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, sehingga pendapatan yang diterima dapat dikatakan fluktuatif.



Gambar 2. Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Provinsi Bali Tahun 2010-2022

Berdasarkan Gambar 2. rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah tertinggi diperoleh oleh Kota Denpasar tahun 2022 sebesar 11,5 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah terendah diperoleh oleh Kab. Karangasem

tahun 2010 sebesar 4,5 tahun. Tingginya angka pendidikan di setiap wilayah tentu saja dapat mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Bali jika dilihat dari data masih cenderung mengalami fluktuasi dan usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Bali belum merata. Penelitian bertujun menganalisis Pengaruh PDRB, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2022.

Beberapa penelitian mencoba mengindentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi PDRB, salah satunya Syahputri dan Fisabilillah (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pengangguran, upah minimum, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitiannya bahwa pengangguran dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut selaras dengan Islami dan Anis (2019) yang meneliti tentang pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Niswati, K (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di provinsi DIY tahun 2003-2011. Hasil dari penelitian adalah pendidikan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DIY, sedangkan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.

Aprilia dan Sugiharti (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah ECM-EG. Hasil penelitian tersebut bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Prayoga, dkk (2021) meneliti tentang pengaruh PDRB, pengangguran, upah minimum kabupaten, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut adalah PDRB, pengangguran, dan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Putri dan Putri (2021) juga meneliti tentang upah minimum, pengangguran, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Riset yang dilakukan Ayu, dkk (2018) yang meneliti terkait hubungan antara angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan perkapita dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Senada dengan jurnal penelitian temuannya Aristina, dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil temuan penelitian tersebut didapatkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Riset yang dilakukan Fadillah (2016) yang meneliti terkait pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis penelitian ini menggunakan panel data. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Akan tetapi, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Senada dengan hasil temuan Bintang (2018) yang meneliti PDRB, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini didapatkan

bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Aini dan Islamy (2021) meneliti tentang dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah pengangguran dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pendidikan, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas telah dijelaskan bahwa pembaruan dari penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu: pertama, terdapat perbedaan pada waktu penelitian terutama tahun penelitian yang dilakukan ini pada tahun 2010-2022. Kedua, perbedaan pada lokasi penelitian yang dilakukan pada Provinsi Bali, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Indonesia. Ketiga, perbedaan variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan variabel rasio PDRB sektor pariwisata, upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB, dan indeks pembangunan manusia.

Metode Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data cross-section dengan time-series, dimana data cross-section ialah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan data time-series ialah data waktu dari tahun 2010-2022 Peneliti juga melakukan studi literatur dengan membaca jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Variabel	Satuan	Simbol	Sumber
Kemiskinan	Persen	KMSKN	BPS
Rasio PDRB Sektor Pariwisata	-	PDRB	BPS
Upah Minimum Kabupaten	Juta Rupiah	UMK	BPS
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	PNDKN	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	KSHTN	BPS

Tabel 1. Definisi Variabel

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Regresi data panel merupakan analisis regresi yang menggabungkan antara data cross-section dengan data time-series. Berikut merupakan Model persamaan umum regresi data panel dalam penelitian ini:

Adapaun persamaan penelitian model panel sebagai berikut:

$$KMSKN_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 PNDKN_{it} + \beta_4 KSHTN_{it} + e_{it}$$

Dimana KMSKN representasi dari tingkat kemiskinan. PDRB menunjukkan rasio PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB. UMK merupakan tingkat Upah minimum kabupaten dan PNDKN menunjukkan rata-rata lama sekolah, serta KSHTN menunjukkan tingkat umur harapan hidup.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 2. menunjukkan jumlah observasi untuk 9 kabupaten/kota selama periode 2010-2022 sebanyak 117 observasi (9 *Cross-section* dan 13 *Time-series*). Nilai rata-rata yang diperoleh kemiskinan (KMSKN) selama periode 2010-2022 adalah sebesar 4,75 persen, dengan nilai tertinggi sebesar 8,11 persen, dan nilai terendah sebesar 1,52 persen. Nilai rata-rata yang diperoleh Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata selama periode 2010-2020 adalah sebesar 0,22, dengan nilai tertinggi sebesar 0,44, dan nilai terendah sebesar 0,09.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	KMSKN	PDRB	UMK	PNDKN	KSHTN
Mean	4,758	0,221	1,84862	7,994	71,917
Maximum	8,110	0,446	2,961	11,5	75,51
Minimum	1,520	0,093	0,829	4,55	68,56
Std. Dev.	1,591	0,087	0,63473	1,664	1,847
Observations	117	117	117	117	117

Sumber: Data diolah

Nilai rata-rata yang diperoleh Upah Minimum Kabupaten (UMK) selama periode 2010-2022 adalah sebesar 1,84 juta rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 2,96 juta rupiah, dan nilai terendah sebesar 0,82 juta rupiah. Nilai rata-rata yang diperoleh Pendidikan (PNDKN) selama periode 2010-2022 adalah sebesar 7,99 tahun, dengan nilai tertinggi sebesar 11,5 tahun, dan nilai terendah sebesar 4,55 tahun. Nilai rata-rata yang diperoleh Kesehatan (KSHTN) selama periode 2020-2022 adalah sebesar 71,91 tahun, dengan nilai tertinggi sebesar 75,51 tahun, dan nilai terendah sebesar 68,56 tahun.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan Uji Chow, Uji Lagrange-Multiplier, dan Uji Hausman, model yang tepat dalam penelitian ini, yaitu menggunakan model Random Effect. Hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa rasio PDRB sektor pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aini dan Islamy (2021) dan hipotesis. Rasio PDRB naik, maka tingkat kemiskinan akan turun hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Sektor pariwisata seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan penyumbang PDRB terbesar dari 17 sektor PDRB di Provinsi Bali. Dalam realitanya, PDRB sendiri mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dengan asumsi jika nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam unit ekonomi juga akan meningkat. Sehingga, ketika PDRB meningkat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Artinya, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel 3. Hasil Regresi Model Random Effect

Variabel	Koefisien	t-Statistic	
С	-11,137	-0,865	
PDRB	-8,721	-4,896**	
UPMK	-0,234	-1,469	
PNDKN	-0,841	-4,042**	
KSHTN	0,347	1,730**	
R ²	0,436		
F-Statistic	21,714**		
Chow test	13,147**		
Hausman test	8,682		
LM test	118,803**		
O-1-1 **-:::::::			

Catatan: **signifikan pada alpha 5%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chairunnisa dan Qintharah (2022) tetapi tidak sesuai dengan hipotesis. Penetapan upah minimum tidak sepenuhnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Bali. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti upah yang diterima masyarakat tidak sepenuhnya sama dengan penetapan upah di Provinsi Bali itu sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Selain itu, Sebagian besar wilayah di Provinsi Bali mendapatkan penghasilan dari sektor pariwisata (tempat oleh-oleh, tempat wisata, temapat makan, dll) sehingga upah yang diterima para pekerja sesuai

dengan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Hal tersebut membuat upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami dan Masjkuri (2018) bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan karena seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi tentu saja mempunyai kemampuan untuk bekerja lebih baik dan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pendidikan yang tinggi hanya dapat dicapai oleh orang kaya karena orang miskin tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi sehingga rata-rata lama sekolah sangat berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ika, dkk (2022) bahwa semakin tingginya angka harapan hidup, maka tingkat kemiskinan akan meningkat terutama di Provinsi Bali. Faktor yang menyebabkan angka harapan hidup berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena angka harapan hidup selama periode 2010-2022 mencapai angka 70-an yang mana usia tersebut bukan lagi usia yang produktif. Usia produktif berkisar antara 15-64 tahun, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas seseorang yang dapat menurunkan penghasilan. Selain itu, angka harapan hidup tinggi penyediaan lapangan pekerjaan yang ditawarkan untuk seseorang yang masih masuk ke dalam usia produktif masih kurang. Oleh karena itu, tugas pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dapat memperketat program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat miskin

Kesimpulan dan Implikasi

Hasil pengujian pada penelitian yang sudah dilakukan terhadap analisis pengaruh PDRB dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2022, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu Rasio PDRB Sektor Pariwisata dan Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010-2022. Implikasi berdasarkan dari hasil analisis penelitian, antara lain Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Bali dapat konsisten dalam menaikkan PDRB sektor pariwisata setiap tahunnya. Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132–141. https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325
- Aprilia, R., Retno, R., Program, S., Ekonomi, S., Fakultas, P., Universitas, E., & Tidar, N. (2022). Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 637–651.
- Aristina, I., Budhi, M., Wirathi, I., & Darsana, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol.6, No.5.
- Aswin, N., & Yasa, I. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 No 11.
- Ayu, N., Pramesti, T., & Bendesa, I. K. G. (2018). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal EP Unud*, 7(9), 1887–1917.
- Bintang, A. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol.33 No.1*.

- Chairunnisa, N., & Qintharah, Y. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal PETA*, *Vol.7 No.1*.
- Fadillah, F. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013. *Jurnal Ekonomi*.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. 1(2).
- Ika, G., Naukoko, A., & Mandeij. (2022). Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 22 No.6.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939–948.
- Larasati Prayoga, M. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Jambura Economic Educational Journal, 3(2).
- Made Ariasih, N. L., & Yuliarmi, N. N. (2021a). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 802–839. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i7.131
- Made Ariasih, N. L., & Yuliarmi, N. N. (2021b). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 802–839. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i7.131
- Millenia Putri, E., & Zaini Putri, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106–114. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains
- Niswati, K. (2014). Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011.
- Siadari, F., & Damanik, D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3).
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2).
- Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. In *Journal Of Economics* (Vol. 2, Issue 2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent.
- Wiadnyana, I. G. A. N. B., & Hadiyati, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *J-MAS* (*Jurnal Manajemen Dan Sains*), 8(1), 722. https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.866
- Wiji Utami, S. U. & Masjkuri, H., (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 28(2). https://doi.org/10.20473/jeba.V28I22018.5822